

ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELEPASAN INFORMASI MEDIS UNTUK KEPENTINGAN VISUM ET REPERTUM

Demiawan Rachmatta Putro Mudiono¹, Choiriyah Az Zahro², Ida Nurmawati³, Nanang Dwi Wahyono⁴

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember

⁴Program Studi Pascasarjana Agribisnis, Jurusan Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember

Email: demiawanrpm@polije.ac.id

ABSTRAK

Penerapan prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan Visum et Repertum di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo belum berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa terdapat peminjaman rekam medis oleh Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah yang tidak sesuai prosedur, dengan jumlah peminjaman sebanyak 22 rekam medis pada bulan Januari 2023, 34 rekam medis pada bulan Februari 2023, dan 25 rekam medis pada bulan Maret 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya SOP pelepasan informasi medis untuk keperluan Visum et Repertum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan empat informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya SOP meliputi kurangnya pengetahuan petugas dalam mensosialisasikan SOP kepada instalasi forensik, sikap disiplin petugas yang rendah dalam peminjaman dan pengembalian rekam medis, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang belum optimal, ditambah dengan kurangnya motivasi untuk menerapkan standar operasional prosedur yang ada.

Kata kunci: Pelepasan Informasi, Rekam Medis, Visum et Repertum

ABSTRACT

The implementation of medical information release procedures for Visum et Repertum at RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo has not been carried out according to the established standard operating procedures (SOP). Based on observations, it was found that there were instances of medical record borrowing by the Forensic and Mortuary Installation that did not follow the proper procedure, with 22 medical records borrowed in January, 34 in February, and 25 in March. This study aims to analyze the factors that contribute to the failure to implement the SOP for the release of medical information for Visum et Repertum purposes. The research employs a qualitative approach with data collection methods including in-depth interviews, observations, and documentation involving four informants. The results of the study reveal that the factors contributing to the failure to implement the SOP include a lack of knowledge among staff in socializing the SOP to the forensic installation, low discipline in borrowing and returning medical records, limited and suboptimal facilities and infrastructure, and a lack of motivation to apply the established standard operating procedures.

Keywords: Release of Information, Medical Records, Visum et Repertum

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Presiden Republik Indonesia, 2009). Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi kesehatan bagi seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kepada pasien. Selain itu, rekam medis berperan dalam mempengaruhi mutu layanan rumah sakit pada fasilitas pelayanan kesehatan, yang tercermin melalui kualitas pengelolaan dan pemanfaatan rekam medis tersebut. (A. Dwi Arimbi, I. Muflihatin, 2021). Pelepasan informasi medis memerlukan ketentuan yang mengatur pelaksanaannya, yang biasanya tertuang dalam SOP, agar proses pelepasan informasi medis dapat berjalan secara efektif.

RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo adalah rumah sakit milik pemerintah yang berlokasi di Ibu Kota DKI Jakarta, berfungsi sebagai rumah sakit rujukan nasional sekaligus rumah sakit pendidikan. Berdasarkan studi pendahuluan di bagian Riset dan Penelitian RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, ditemukan bahwa petugas Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah meminjam rekam medis melalui media sosial, yaitu WhatsApp, untuk keperluan Visum et Repertum. Praktik ini tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, di mana petugas forensik seharusnya mengirimkan surat permintaan peminjaman rekam medis terlebih dahulu kepada bagian Riset dan Penelitian.

Data menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2023 terdapat 22 rekam medis yang dipinjam tanpa mengikuti prosedur, pada bulan Februari sebanyak 34 rekam medis, dan pada bulan Maret sebanyak 25 rekam medis. Jumlah ini mencerminkan peminjaman rekam medis oleh Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah yang tidak sesuai dengan alur SOP yang berlaku. Petugas diharapkan dapat melindungi informasi rekam medis dari risiko pemalsuan, kerusakan, kehilangan, dan akses tidak sah. Apabila pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, hal ini dapat meningkatkan risiko kerusakan, kehilangan, serta potensi kebocoran data. (Erlindai & Yulita, 2018).

Hasil studi pendahuluan dilakukan ditemukan dugaan sementara bahwa petugas peminjaman kurang memahami SOP peminjaman rekam medis, serta kurangnya penyampaian SOP yang memadai kepada petugas untuk memastikan implementasinya. Salah satu standar pelayanan yang baik tercermin dalam penerapan SOP yang sesuai (Kholifah et al., 2020). Selain itu dugaan petugas riset belum memiliki akses ke aplikasi SINDE (Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik) yang diperlukan untuk mengakses surat permintaan peminjaman rekam medis. Selain itu, aplikasi EHR (*Electronic Health Record*) yang digunakan untuk mencatat peminjaman rekam medis sering mengalami *downtime*. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung kinerja petugas dan mempermudah pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai prosedur yang berlaku (Kholifah et al., 2020). Dugaan lain mengenai permasalahan tersebut yaitu belum menerima motivasi yang memadai baik dari kepala sub bagian maupun pihak lain terkait. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja petugas, yang cenderung kurang optimal karena tidak adanya timbal balik yang memadai dari atasan mereka. Motivasi seseorang dapat dievaluasi melalui perilaku, perasaan, dan ucapan petugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi SOP pelepasan informasi medis untuk kepentingan Visum et Repertum dengan menggunakan teori Lawrence Green. *Predisposing factor* (faktor predisposisi) yang akan diteliti meliputi pengetahuan, sikap, dan tingkat pendidikan, *Enabling factor* (faktor pemungkin) mencakup sarana dan prasarana serta *Reinforcing factor* (faktor penguat) meliputi motivasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada teori Lawrence Green, yang mencakup tiga variabel utama: *predisposing factor* (faktor predisposisi), *enabling factor* (faktor pendukung) dan *reinforcing factor* (faktor pendorong). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sub Bagian Pengelolaan Rekam Medis, Penanggung Jawab Pelayanan Rekam Medis, petugas dari Bagian Riset dan Penelitian, serta petugas dari Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam mengenai penerapan SOP peminjaman rekam medis untuk keperluan Visum et

Repertum. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

HASIL

Menganalisis *Predisposing factor* (Faktor Predisposisi) dalam Implimentasi SOP Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum et Repertum

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pengetahuan petugas mengenai SOP peminjaman rekam medis untuk keperluan Visum et Repertum masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas terkait prosedur pelepasan informasi medis, di mana SOP tersebut belum tersosialisasikan dengan baik dan belum diterapkan secara efektif. Berikut adalah pernyataan dari informan yang mendukung temuan ini:

“SOPnya gak dilaksanakan dan belum disosialisasikan kembali karena prosedurnya sama dengan alur peminjaman rekam medis pada umumnya. Perbedaannya ada pada surat permintaan peminjaman rekam medis khusus untuk kepentingan Visum et Repertum....”(Informan 1,2,3,4)

Hasil penelitian terkait sikap, dapat diketahui bahwa petugas forensik masih belum disiplin dalam pengembalian rekam medis yang mana petugas menumpuk beberapa rekam medis terlebih dahulu kemudian petugas mengembalikan rekam medis ke bagian riset. Hal tersebut dikarenakan petugas forensik belum mengetahui SOP dan petugas riset tidak memberikan batas waktu karena di SOP belum tertera mengenai jangka waktu peminjaman. Berikut pernyataan pendukung oleh informan.

“Harusnya sih ada waktunya, ini waktu itu kita los karena kita tidak tau selesainya disana itu berapa lama, misalnya kita kasih waktu 2x24 jam tapi kan disana belum tentu dia bisa karena dia itukan harus mencari dokter untuk mengisis itu dan itu estimasinya tidak bisa diperhitungkan. Ada rencana perbaikan karena sop sekarang lagi ada perbaikan revisi lagi...” (Informan 1,2,3).

Menganalisis *Enabling Factor* (Faktor Pemungkin) dalam Implementasi SOP Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum et Repertum

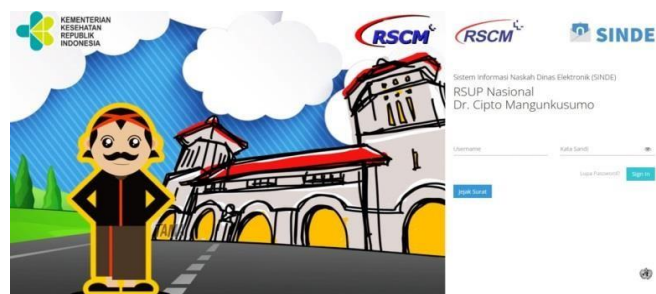
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa petugas riset belum memiliki hak akses ke aplikasi Sinda yang digunakan untuk mengakses surat permintaan peminjaman rekam medis. Akibatnya, petugas riset masih

mengandalkan akses dari penanggung jawab riset untuk menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari informan:

"Selama ini untuk permintaan visum by whatsapp saja dari petugas bagian forensik tanpa melampirkan surat permintaan karena belum terlaksana. Jika sudah terlaksana sop nya untuk surat permintaan dapat dikirimkan melalui aplikasi Sinda (Sistem Informasi Naskah Elektronik) yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit dan untuk saya akunya belum masih dalam proses pembuatan. Jadi dalam proses pembuatan saja..."(Informan 3).

"iya selama ini untuk permintaan visum et repertum kami hanya berkomunikasi melalui wa, soalnya di aplikasi sinde saya masih belum bisa akses..." (informan 4).

Informan penelitian menyatakan bahwa dalam peminjaman rekam medis untuk keperluan Visum et Repertum Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah meminta rekam medis ke bagian Riset dan Penelitian melalui sosial media yaitu whatsapp dikarenakan petugas tidak mengetahui aplikasi yang telah disediakan oleh rumah sakit berikut tampilan aplikasi Sinda :



Gambar 1. Menu login Aplikasi Sinda

RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki aplikasi EHR yang mana peminjaman dan pengembalian rekam medis di inputkan menggunakan aplikasi EHR dengan menginputkan bon peminjaman dan bon pengembalian rekam medis. Berikut gambar aplikasi EHR:



Gambar 2. Menu Pengembalian Rekam Medis di Aplikasi EHR

Informan menyatakan bahwa Aplikasi EHR sering kali mengalami down time, jika terjadi petugas menuliskan manual terlebih dahulu Berikut pernyataan informan:

” Kalau misalkan down time ya, kita nunggu dulu. Kalau misal ada kata-kata down time ya digrub oh ya berarti ehr lagi down time. Kalau dari bagian riset sih kita catat manual dulu setelah ehnya tidak down time lagi baru kita input. Jadi di ehr sangat penting karena mencangkup semuanya keberadaan berkas dimana terus kita juga bisa menarik data berkas yang dipinjem oleh petugas itu berapa dan berapa untuk laporan ...” (Informan 3).

“ permasalahan downtime ini memang sering terjadi dek. Strategi dari unit kami selalu saya instruksikan bahwa petugas harus mencatat secara manual terkait peminjaman serta pengembalian berkas supaya tau keberadaan berkasnya” (informan 1).

Menganalisis Reinforcing Factor (Faktor Penguat) dalam Implementasi SOP Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum et Repertum

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa petugas bagian riset belum menerima motivasi yang memadai baik dari Kepala Sub Bagian Pengelolaan Rekam Medis maupun pihak lainnya. Kondisi ini memungkinkan petugas untuk melaksanakan tugas seperti biasa, dengan anggapan bahwa hasil pekerjaan yang telah dilakukan sudah diterima oleh atasan mereka, meskipun tidak sesuai dengan SOP peminjaman rekam medis untuk keperluan Visum et Repertum. Pernyataan ini didukung oleh informan:

“Enggak, karena bukan kewenangan bapak. Karena seharusnya kepala rekam medis” (Informan 2).

“Menurut saya, masalah utama yang kami hadapi adalah kurangnya komunikasi mengenai SOP yang berlaku, terutama dalam peminjaman rekam medis untuk Visum et Repertum. Kami tidak menerima motivasi atau instruksi yang cukup jelas mengenai hal ini, sehingga kami sering bekerja sesuai dengan kebiasaan.....” (informan 4).

PEMBAHASAN

Predisposing factor (faktor predisposisi) merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau memberikan dorongan bagi individu untuk melakukan perilaku kesehatan. *Predisposing factor* (faktor predisposisi) dalam penelitian ini

meliputi pengetahuan, sikap dan tingkat pendidikan petugas. Tingkat pengetahuan petugas kurang baik dapat diketahui karena petugas tersebut belum paham terkait standar operasional prosedur (Putra et al., 2022). Mahendra D et al., (2019) menjelaskan kurangnya pemahaman tentang suatu pengetahuan dapat berdampak pada hasil kerja yang kurang optimal dan menyebabkan prosedur pelepasan informasi tidak berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Ketidaktahuan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai SOP peminjaman rekam medis untuk keperluan Visum et Repertum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi kepada petugas forensik terkait SOP peminjaman rekam medis untuk keperluan Visum et Repertum. Sosialisasi memiliki peran yang sangat penting karena merupakan proses penyampaian atau transfer kebiasaan, nilai, dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam suatu organisasi, sehingga seluruh anggota organisasi dapat memahami tugas atau peran yang harus dijalankan. (Widiyanto et al., 2020). Peminjaman rekam medis perlu diatur dengan ketentuan mengenai jangka waktu peminjamannya, dan seharusnya setiap rekam medis dikembalikan ke tempat penyimpanan pada akhir setiap hari kerja. (Wardani et al., 2015). Hal tersebut dapat menghambat kelancaran pelayanan kesehatan kepada pasien. Salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan rekam medis yang efektif adalah ketepatan waktu pengembalian rekam medis pasien ke unit rekam medis (Krisnawati et al., 2021). Tingkat pendidikan petugas rekam medis menunjukkan bahwa tiga petugas memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, di mana pegawai rekam medis diharuskan memiliki kualifikasi pendidikan formal minimal Diploma III Rekam Medis (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Enabling factor (faktor pemungkin) meliputi sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku kesehatan seseorang. Sarana pelayanan rekam medis berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pelayanan, sementara prasarana mencakup segala hal yang menjadi penunjang utama dalam terselenggaranya proses pelayanan pasien (Simanjuntak, 2021). Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan peminjaman rekam medis di bagian riset dan penelitian, seperti penggunaan aplikasi SINDE dan aplikasi EHR. Fasilitas penunjang tersebut memiliki pengaruh terhadap perilaku petugas dalam

melaksanakan tugasnya. (Rika Andriani et al., 2022). Aplikasi Sinda adalah sistem yang disediakan oleh pihak rumah sakit untuk proses surat menyurat internal. Selama ini, Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah belum pernah mengirimkan surat permintaan peminjaman rekam medis untuk keperluan Visum et Repertum. Semua fasilitas yang ada secara langsung mendukung dan menunjang proses pelayanan, khususnya dalam kegiatan peminjaman rekam medis untuk keperluan Visum et Repertum, yang bertujuan untuk memperlancar pekerjaan agar lebih teratur, efektif, dan efisien. Aplikasi EHR digunakan oleh bagian riset untuk mencatat bon peminjaman dan pengembalian rekam medis, serta untuk memantau keberadaan rekam medis tersebut. Rumah sakit seharusnya memelihara sistem informasi ini agar dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat mendukung pekerjaan dan memberikan dampak positif terhadap kinerja petugas (Puspitasari & Istiono, 2017). Sistem informasi saat ini sangat diperlukan karena dapat membantu petugas riset dalam memantau dan mengelola rekam medis yang dipinjam, serta memastikan apakah rekam medis tersebut sudah dikembalikan atau belum. Dengan adanya sistem informasi ini, petugas tidak perlu menghabiskan waktu yang lama untuk memeriksa keberadaan rekam medis sebelum dipinjamkan (Ambar et al., 2021).

Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang dalam suatu organisasi bersedia dan rela mengarahkan kemampuannya, baik berupa keahlian, keterampilan, tenaga, maupun waktu, untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, motivasi juga mendorong individu untuk memenuhi kewajibannya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Salsabilla & Fannya, 2022). Setiap individu memiliki motivasi kerja, namun ada sebagian orang yang menunjukkan tingkat semangat kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain ketika mereka menerima dorongan atau motivasi (Widiyanto et al., 2020). Motivasi dapat diberikan melalui penerapan sanksi kepada petugas yang tidak memenuhi standar atau melalui pemberian penghargaan, seperti penambahan gaji atau bentuk apresiasi lainnya, kepada petugas yang menunjukkan kinerja maksimal (Swari et al., 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan *Predisposing factor* (faktor predisposisi), SOP peminjaman rekam medis untuk keperluan Visum et Repertum belum tersosialisasikan dan

diterapkan dengan baik, sehingga petugas tidak sepenuhnya memahami prosedurnya. Selain itu, SOP tersebut belum mengatur jangka waktu pengembalian rekam medis. Petugas rekam medis sudah memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditetapkan. *Enabling factor* (faktor pemungkin) lainnya adalah petugas riset yang belum memiliki akses ke akun Sinda dan aplikasi EHR yang pernah mengalami gangguan. *Reinforcing factor* (faktor penguat) adalah kurangnya motivasi bagi petugas untuk melaksanakan SOP dengan baik.

Peneliti menyarankan agar segera disosialisasikan SOP peminjaman rekam medis, menetapkan batas waktu peminjaman dan pengembalian untuk Visum et Repertum, serta menyusun alur peminjaman dan surat permintaan yang jelas. Pemeliharaan aplikasi Sinda dan EHR serta pelatihan petugas juga perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dwi Arimbi, I. Muflihatin, N. M. (2021). Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 2(2), 221–229.
- Ambar, S., Putri, K., Muna, N., Erawantini, F., & Roziqin, M. C. (2021). Sistem Pengambilan Dan Pengembalian Rekam Medis Rawat Inap Berbasis Web Menggunakan Metode Prototype Di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan*, 11(1), 2021.
- Departemen Kesehatan RI. (2006). *Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit*.
- Erlindai, & Yulita, T. (2018). Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 3(2), 438–443.
- Kholifah, A. N., Nuraini, N., & Wicaksono, A. P. (2020). Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga. *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 1(3), 364–373.
- Krisnawati, R., Siagian, A. W., Yulinda, E. N., & Sirait, P. (2021). Tinjauan Waktu Pengembalian Berkas Rekam Medis Rawat Jalan Di Poli Paru Dan Poli Jantung Di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan*, 25–33.
- Mahendra D, Jaya I. M M., & Lumban A. M. R. (2019). *Buku Ajar Promosi Kesehatan*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/ MENKES/ 312/ 2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan*.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis*.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*.
- Puspitasari, S. M., & Istiono, W. (2017). Penilaian manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) terhadap individu dan organisasi dengan model delone dan mclean pada rsud dr . Hardjono kabupaten ponorogo. *Journal of Information Systems for Public Health*, 2(3), 9–17.
- Putra, D. P., W., W. W., & S., S. (2022). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Missfile Di Ruang Filing Rumah Sakit Umum Assalam Gemolong. *Journal Health Information Management Indonesian*, 1(1), 26–36.
- Rika Andriani, D. S., Wulandari, & Margianti, R. S. (2022). Rekam Medis Elektronik sebagai Pendukung Manajemen Pelayanan Pasien di RS Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Ilmu Perkam Medis Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 7(1), 96–107.
- Salsabilla, & Fannya, P. (2022). Tinjauan Motivasi Kerja Petugas Rekam Medis Di RSUD Raden Mattaher Jambi. *Jurnal Perkam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 5(2), 1–5.
- Simanjuntak, E. (2021). *Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis*. UIM Press.
- Swari, S. J., Alfiansyah, G., Wijayanti, R. A., & Kurniawati, R. D. (2019). Analisis Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 50–56.
- Wardani, D., Lestari, T., & Harjanti. (2015). Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Peminjaman Dokumen Rekam Medis Di Unit Filing Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali. *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 59–71.
- Widiyanto, Alfiansyah, G., & Mudiono, D. R. P. (2020). Analisis Penyebab Tidak Ditemukan Dokumen Rekam Medik Bagian Riset RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 1(3), 208–2015